

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK

YULIANA .WAMBUKOMO
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay (STIE) Jayapura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Puncak

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode Studi Pustaka Yaitu Dengan mengumpulkan data-data dari berbagai referensi buku, selanjutnya dianalisis dan di ambil sebagai kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Daerah

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Puncak dengan Ibukota Ilaga merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Sebagaimana yang dihadapi oleh daerah otonom baru di kawasan Timur Indonesia, Kabupaten Puncak dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis. Namun ditengah keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Puncak dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak pada periode 4 tahun dari tahun 2010 hingga 2013, dapat dilihat pada rincian tabel berikut ini :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak Periode 2010 -2013

Tahun	PAD	Persen (%)
2010	8.548.501.901,00	597,86
2011	15.133.036.585,00	960,53
2012	17.591.269.789,00	123,94
2013	25.210.706.159,00	110,51
Rata-rata		448,21

Sumber : data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.548.501.901 dengan persentase sebesar 597,86%, tahun 2011 sebesar Rp. 15.133.036.585 dengan persentase sebesar 960,53%, tahun 2012 sebesar Rp. 17.591.269.789 dengan persentase sebesar 123,94% dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 25.210.706.159 dengan persentase sebesar 110,51%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak dari

tahun ke tahun dapat dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa, pemerintah Kabupaten Puncak telah berusaha dengan baik demi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan Belanja Daerah demi pembangunan yang lebih efektif.

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut UU No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; dan 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Puncak, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2 Belanja Daerah Kabupaten Puncak Periode 2010-2013

Tahun	Belanja Daerah	Persen (%)
2010	565.538.690.757,00	70,33
2011	679.662.191.790,00	67,21
2012	978.278.206.159,00	75,63
2013	1.151.512.796.166,00	79,92
Rata-rata		73,21

Sumber : data diolah, 2013

Dari tabel di atas, diketahui bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak dari tahun ke tahun semakin besar. Pada tahun 2010 belanja daerah Kabupaten Puncak sebesar Rp. 565.538.690.757 dengan persentase sebesar 70,33%, pada tahun 2011 sebesar Rp. 679.662.191.790 dengan persentase sebesar 67,21%, pada tahun 2012 sebesar Rp. 978.278.206.166 dengan persentase sebesar 79,92% serta pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.151.512.166 dengan persentase sebesar 79,92%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, dari tahun 2010 hingga tahun 2013 pemerintah Kabupaten Puncak memiliki belanja daerah yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kebutuhan daerah demi terlaksananya pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian

pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada Belanja Daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran Belanja Daerah dengan baik karena Belanja Daerah merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Daerah, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang

bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan Belanja Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*. Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah Belanja Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2009 hingga 2013 di Kabupaten Puncak Papua. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 4 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi Belanja Daerah saat ini. Selain itu, dalam penelitian ini menambah variabel baru dan menjabarkan variabel yang pada penelitian sebelumnya kurang terperinci yaitu mengenai pajak daerah sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiwit Agustina menggunakan data tahun 2001 hingga 2007 dan menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer. Hasil yang diperoleh adalah PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian

Belanja Daerah, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Daerah. Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa kebanyakan Pemda menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi, sementara sebagai sumber utama Belanja Daerah, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemda mengandalkan DAK. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya *research gap* tersebut, dan untuk memberikan hasil atas variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian Belanja Daerah. Dengan lebih memperinci variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel pajak daerah, disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru.

Berdasarkan judul di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Puncak”**.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Least Squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap Alokasi Belanja Daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam analisis regresi linier akan dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3. Analisa Regresi dengan SPSS seri 21.00

Variabel	Koefisien B	t _{hitung}	Signifikan	Keterangan
Constant	78,250			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,212	4,215	0,042	Signifikan
$\alpha = 0,05$ $R = ,948$ Koefisien Determinasi (R ²) = ,848 F-Hitung = 17,769 Signifikan = ,042 t _{tabel} = 2,353				

2.2. Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa Alokasi Belanja Daerah. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 21.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekaran, 1992). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y = a + \beta x + e$$

dengan :

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e = Error Term

2.2.1. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006).

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin

baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (Ghozali, 2006).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Linier Sederhana

Analisis linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X) terhadap variable Belanja Daerah (Y). Ringkasan hasil analisis regresi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Hasil regresi yang didapatkan berdasarkan table 1. adalah sebagai berikut:

$$Y = 78,250 + 0,212X + e$$

dengan :

Y : Belanja Daerah

X₁ : PAD

a :78,250 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel bebas yaitu X sama dengan nol, maka besarnya variabel Y (Belanja Daerah) adalah 78,250. Dengan kata lain jika variabel bebas PAD X nilainya dianggap nol berarti Belanja Daerah akan menurun sebesar 78,250.

b₁ : 0,212 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas X PAD yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel X PAD akan meningkatkan variabel terikat Y (Belanja Daerah) sebesar 0,212. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel PAD ada kecenderungan meningkat sebesar 0,212 maka

Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,212. Jika variabel PAD ada kecenderungan menurun, maka Belanja Daerah juga akan menurun sebesar 0,212

3.2. Uji Hipotesis

3.2.1. Uji Statistik t

Uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Apabila *p-value* < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila *p-value* > 0,05 maka hipotesis tidak terdukung (Ghozali, 2005). Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa statistik uji t terhadap PAD (X) sebesar 4,215 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar daripada t tabel (4,215 > 2,353) dengan signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

a. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dan model regresi. Dalam penelitian ini uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa besar variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel PAD (X) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,948 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel PAD (X) adalah sebesar 94,8% sedangkan nilai R square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,848 yang berarti bahwa variabel independent (PAD (X)) mampu menjelaskan variabel dependent (Belanja Daerah (Y)) sebesar 84,8% dan selebihnya sebesar 15,2% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan menggunakan bantuan software SPSS versi 21.00, didapatkan statistik uji t terhadap PAD (X) sebesar 4,215 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} (4,215 > 2,353) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Puncak maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak pun akan semakin besar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah. Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Puncak

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Anggaran yang merupakan blue print organisasi memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2011). APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Dari data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Puncak antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sebagian besar lemahnya SDM ditengarai dengan lemahnya kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah. Banyaknya pegawai juga membuat belanja tidak langsung menjadi selalu lebih besar dari belanja langsung. Mengingat perencanaan dan penganggaran idealnya terintegrasi, maka faktor kemampuan (kapasitas) SDM menjadi penting, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang riil sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan prioritas nasional. Lemahnya SDM juga ditengarai dengan sebagian besar posisi TAPD di masing-masing lokasi kajian relative tidak stabil, rata-rata dua tahun sudah dirotasi ke tempat atau posisi lain sehingga posisi TAPD hampir selalu diisi dengan pegawai-pegawai yang relatif baru dan harus belajar kembali dalam proses penganggaran.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Luasnya wilayah dianggap menjadi beban bagi daerah dalam mengelola kepentingan dan fasilitas publiknya, meskipun sebenarnya potensi yang tersimpan di dalamnya sangat besar untuk dapat dieksploitasi. Dalam hal ini, luas wilayah menjadi penghambat, namun sebenarnya dapat dibalik menjadi potensi yang besar. Potensi alam yang

ada di masing-masing lokasi kajian merupakan faktor positif bagi proses penganggaran karena jika dieksploitasi dengan optimal akan menghasilkan pendapatan yang relatif tidak terbatas.

3. Faktor Kebijakan

Ada kebijakan pusat yang tidak memungkinkan daerah untuk menggali pendapatan daerah secara lebih leluasa. Potensi SDA yang besar yang tereksplorasi pun tidak dapat langsung dinikmati oleh daerah karena ternyata kewenangan daerah untuk itu relatif terbatas. Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat kaya akan hasil tambang juga tidak dapat langsung berkontribusi bagi pendapatan daerahnya. Dalam hal ini, faktor kebijakan menjadi faktor negatif yang menghambat kemungkinan daerah untuk meningkatkan kualitas penganggarnya.

4. Faktor Lain

Komitmen pemerintahan daerah untuk memprioritaskan kepentingan publik terutama berkaitan dengan pengentasan kemiskinan juga ikut menentukan kualitas belanja daerah. Komitmen ini dapat terbangun dengan sendirinya sesuai dengan kapasitas pemerintahan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kapasitas legislatif juga sangat menentukan kualitas anggaran dan belanja daerah. Legislatif yang komit dengan nilai-nilai keadilan akan menghasilkan penganggaran yang lebih adil, legislatif yang komit dengan demokratisasi akan menghasilkan belanja dan proses penganggaran yang responsif terhadap masukan dari masyarakatnya.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Puncak maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak pun akan semakin besar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Puncak antara lain adalah :
 - a. Faktor sumberdaya manusia berkaitan dengan kemampuan alokasi anggaran dan penggalan potensi daerah. Faktor ini cenderung berkaitan dengan indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas;
 - b. Faktor sumberdaya alam berkaitan dengan potensi yang ada dan oleh karena itu, asumsi dasarnya adalah

bahwa semua lokasi mempunyai sumberdaya alam yang sama potensinya. Faktor ini juga berkaitan dengan indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

- c. Faktor kebijakan pusat berkaitan dengan regulasi pusat dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah. Faktor ini cenderung berkaitan dengan indikator equity/keadilan, akuntabilitas dan responsivitas.
- d. Faktor komitmen legislatif berkaitan dengan kesadaran dan keinginan legislative untuk merumuskan anggaran daerah yang lebih baik. Faktor ini cenderung berkaitan dengan indikator equity/keadilan, akuntabilitas dan responsivitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Isdijoso, Brahmantio, 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana

- (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Safitri, Nurul Aisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
- Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Sukriy dan Halim Abdullah (c), *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.